

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

*Analysis Of Effectiveness And Efficiency Of Employee Expenditure At The  
Regional Financial Agency Of The City Of Parepare*

Yadi Arodhiskara<sup>1</sup>, Jumriani<sup>2</sup>, Indah Kavitasari<sup>3</sup>  
Email : [yadhi01@gmail.com](mailto:yadhi01@gmail.com)<sup>1</sup>, [jumrianisemsi@gmail.com](mailto:jumrianisemsi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indah.kavita.sari.121296@gmail.com](mailto:indah.kavita.sari.121296@gmail.com)<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas belanja langsung pada belanja pegawai di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja langsung pada belanja pegawai di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Metode ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Tempat penelitian pada Kantor Keuangan Daerah Kota Parepare dari bulan Januari sampai Maret 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama menggunakan rumus rasio efektivitas dan yang kedua menggunakan rumus efisiensi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran bagaimana anggaran pegawai dan pengeluaran pegawai. Hasil analisis rasio efektivitas Anggaran Belanja Pegawai pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diperoleh hasil rata-rata sebesar 93,956% dengan kriteria penilaian efektivitas yaitu Efektif. Meskipun penyajian belanja pegawai sudah memenuhi kriteria efektif, namun masih banyak anggaran yang belum terealisasi di beberapa program kerja. Hasil analisis rasio efisiensi Anggaran Belanja Pegawai pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diperoleh hasil rata-rata sebesar 13,25% dengan kriteria penilaian efisiensi yaitu Sangat Efisien.

**Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengeluaran Karyawan**

## Abstract

*The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of direct spending on personnel expenditures at the Parepare City Regional Finance Office, to determine the level of efficiency of direct spending on personnel expenditures at the Parepare City Regional Finance Office. This method uses descriptive quantitative research. The research location is at the Parepare City Regional Finance Office from January to March 2019. The analytical technique used in this study is the first to use the effectiveness ratio formula and the second to use the efficiency formula. This study is to find out how the employee budget and employee expenses. The results of the analysis of the effectiveness ratio of the Employee Expenditure Budget at the Regional Finance Office of the City of Parepare obtained an average result of 93.956% with the effectiveness assessment criteria namely Effective. Although the presentation of personnel expenditures has met the effective criteria, there are still many unrealized budgets in several work programs. The results of the efficiency ratio analysis of the Employee Expenditure Budget at the Regional Finance Office of the City of Parepare obtained an average result of 13.25% with the efficiency assessment criteria being Very Efficient.*

**Keywords: Effectiveness, Efficiency, Employee Expenditure**



## PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 36 menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 37 menyebutkan bahwa kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi basil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 51 menyebutkan bahwa kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 38 menyebutkan bahwa dalam belanja tidak langsung Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 51 menyebutkan bahwa pada belanja langsung belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah. Dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Nur Afiah Nunuy (2010:15) menyatakan bahwa Belanja daerah, Meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Mohammad Ma'ruf\_ (2006) menyatakan bahwa belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang di berikan kepada pegawai negeri dan pensiunan serta pegawai honorer, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai terdiri atas Uang lembur, Uang makan, Honorarium/upah dan Vakasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Januari sampai pada Bulan Maret 2019. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian, Dokumentasi, yaitu pengambilan data belanja pegawai dari kantor Badan Keuangan Daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan ratio.. Dalam penelitian ini ratio yang digunakan untuk mencari efektifitas dan efisiensi ,Berikut analisis data yang digunakan:

### 1. Rasio Efektivitas

Mahsun (2013) menyatakan bahwa efektifitas dapat di ukur dengan membandingkan realisasi belanja pegawai dengan anggaran belanja pegawai. Dalam hal ini efektifitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung (Belanja Pegawai)}}{\text{Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai)}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2013)

### 2. Rasio Efisiensi

Mahsun (2013) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara input dan output. Input disini adalah realisasi belanja pegawai sedangkan output adalah realisasi belanja langsung. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung (Belanja Pegawai)}}{\text{Realisasi Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahsun, 2013)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio Efektivitas

Tabel 1  
Kriteria Efektivitas

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Kriteria
2014	2.437.367.500	2.283.403.500	93,68	Efektif
2015	2.643.628.000	2.358.210.700	89,20	Efektif
2016	2.686.811.500	2.456.806.000	91,44	Efektif
2017	3.476.124.000	3.449.344.000	99,23	Efektif
2018	3.476.124.000	3.345.028.000	96,23	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>93,96</b>	<b>Efektif</b>

Pada tabel 1. merupakan hasil penelitian tentang Rasio Efektivitas Belanja langsung pada belanja pegawai dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Kriteria efektivitas adalah sebesar 93,96% dengan kriteria efektivitas adalah Efektif. Rincian diatas menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi belanja pegawai belum efektif sepenuhnya. Masih ada program-program yang menganggarkan dana tapi realisasinya tidak sesuai atau bahkan tidak terealisasi sama sekali. Hal ini disebabkan karena tidak semua perencanaan anggaran terealisasi sesuai dengan rencana. Dimana saat kegiatan pada program telah berjalan, anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya di belanjakan sesuai dengan yang telah di

anggarkan karena Belanja Pegawai di lakukan sesuai dengan kebutuhan ini dinyatakan oleh Bapak Allimuddin, Staf Keuangan Bagian SETDAKO.

Dari data jumlah anggaran dan realisasi pertahun dapat diketahui bahwa perbedaan anggaran tidak terlalu jauh berbeda selama 3 tahun pertama dan pada saat Badan Keuangan Daerah dibuat kembali yaitu pada tahun 2017 anggaran dari tahun sebelumnya meningkat dikarenakan ada penambahan dari segi belanja itu sendiri.

## 2. Rasio Efisiensi

Tabel 2  
Kriteria Efektivitas

Tahun	Realisasi Belanja Pegawai (Rp)	Realisasi Belanja Langsung(Rp)	%	Kriteria
2014	2.283.403.500	13.294.056.753	17,18	Sangat Efisien
2015	2.358.210.700	17.056.423.502	13,83	Sangat Efisien
2016	2.456.806.000	16.230.540.097	15,14	Sangat Efisien
2017	3.449.344.000	33.360.270.697	10,34	Sangat Efisien
2018	3.345.028.000	34.274.890.086	9,76	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>13,25</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Pada tabel 2. merupakan hasil penelitian tentang Rasio Efisiensi Belanja langsung pada belanja pegawai dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Kriteria efisiensi adalah sebesar 13,25% dengan kriteria efisiensi adalah Sangat Efisien.

Dari pembahasan diatas Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dapat mengelola anggaran belanja langsung dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja yang berkaitan pada belanja langsung. Realisasi belanja pegawai dan belanja langsung selama tahun 2014, 2015, 2016 menunjukkan kenaikan yang tidak signifikan namun pada tahun 2017, 2018 realisasi belanja pegawai dan belanja langsung meningkat hal ini di karenakan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare telah merealisasikan belanja pegawai dan belanja langsung sesuai dengan anggaran tahun berjalan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas Anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dari tahun 2014-2018 diperoleh hasil rata-rata sebesar 93,96% dengan kriteria penilaian efektivitas yaitu Efektif. Walaupun presentasi belanja pegawai memiliki kriteria efektif namun masih banyak anggaran yang belum terealisasi pada beberapa program kerja.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi Belanja Langsung pada Belanja Pegawai pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diperoleh hasil rata-rata sebesar 13,25% dengan kriteria penilaian efisiensi yaitu Sangat Efisien. Namun terlihat bahwa efisiensi belanja pegawai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 17,18% dan masuk dalam kategori sangat efisien dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 tingkat efisiensi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,83% masuk kriteria sangat efisien. Kemudian pada tahun selanjutnya tahun 2016 presentasi efisiensi menurun dari tahun sebelumnya sebesar 15,14 % namun masih masuk pada kriteria sangat efisien. Pada tahun 2017 tingkat efisien sebesar 10,34% naik dari tahun sebelumnya dan masuk dalam kriteria sangat efisien

selanjutnya pada tahun 2018 tingkat efisien sebesar 9,76% naik kembali dari tahun selanjutnya.

### Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung untuk Belanja Pegawai pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Parepare terkhusus pegawai Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare agar tingkat efektivitas lebih ditingkatkan dengan memperhatikan program kerja agar sesuai dengan anggaran dan realisasinya.
2. Diharapkan kepada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare agar mempertahankan tingkat efisien bahkan dapat lebih ditingkatkan agar kriteria tingkat efisien tidak terus mengalami kenaikan.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian tentang Belanja Langsung pada Belanja Pegawai agar dapat dibandingkan dengan data-data terbaru mengenai Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung pada Belanja Pegawai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2010. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Basariyah,Siti. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 63-74 ISSN: 2302-2019.
- Mahsun, 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cetakan Keempat. BTFE Yogyakarta.
- Mahsun, 2006. Pengukuran Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Yogyakarta BPEP.
- Ma'ruf, Mohammad. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_,2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sajow,Cenissa, Jenny Morasa, Heince R. N Wokas. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1214 –1224.
- Saron,Yusra. 2017. *Analisa Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar*.